

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM BELA BELI KULON PROGO

Kurnia Rifqi Febrian

20120520016

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mewujudkan Program Bela Beli Kulon Progo, karena program yang digagas oleh Bupati dr.H. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) ini tergolong inovatif dan berani. Program Bela Beli Kulon Progo adalah gerakan membela dan membeli produk-produk lokal, program ini resmi dicanangkan sejak 25 maret 2013 untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri ketimbang produk asing. Dukungan masyarakat terhadap produk lokal diharapkan mampu menghadapi persaingan Asean Free Trade Area (AFTA) di tahun 2015. Program ini penulis rasa cukup unik karena Bupati Kulon Progo begitu bersemangat dalam menggelorakan program ini demi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Bahkan dengan terobosan dan upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo berhasil mengupayakan produksi dan inovasi diatas untuk mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Hak cipta dari kementerian Hukum dan HAM RI serta izin produksi dan pengakuan dari Standar Nasional Indonesia (SNI) sejak tahun 2013.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh kemudian menganalisa sesuai dengan objek yang diteliti dan menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada sehingga memberikan gambaran tentang peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam mewujudkan program Bela Beli Kulon Progo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa wawancara dan dokumentasi, yaitu penulis melakukan wawancara dengan jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta data melalui dokumen dan peninggalan tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa peran dari Dinas Koperasi dan UMKM ini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan baik itu dari bidang kelembagaan, permodalan, dan pemberdayaan yang sudah menjalankan tupoksinya dengan baik dan memberikan peningkatan serta kemajuan dalam berjalannya program bela beli kulon progo, namun memang belum semuanya berjalan maksimal karena harus diakui hambatan berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran masih sangat berpengaruh besar terhadap jalannya program maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan Program Bela Beli Kulon Progo sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang terasa bagi perkembangan Koperasi dan UMKM baik dari penyelenggaranya maupun anggarannya. Saran bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan sarana prasarana, dan perhatian dari pemerintah daerah yaitu berupa anggaran agar program ini berjalan dengan lebih baik seperti yang diharapkan.

Key word : Peran, Dinas Koperasi dan UMKM, Bela Beli Kulon Progo

PENDAHULUAN

Era globalisasi pada saat ini telah meningkatkan kadar hubungan antar negara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Hal tersebut tercermin dengan peluang untuk menjadi bagian dari produksi global. Dengan demikian setiap negara harus dapat menciptakan tingkat efisiensi dan produktifitas yang paling optimal, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi di pasar global. Dalam era globalisasi, setiap pelaku ekonomi diharuskan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing baik dalam memproduksi dan memasarkan suatu produk maupun menerobos batas-batasnya yang semakin tidak jelas atau dengan perkataan lain harus mampu bersaing dalam perekonomian yang kompetitif. Hal ini disebabkan dalam era globalisasi kemampuan produksi dan pemasaran dilandaskan pada kemampuan menciptakan barang atau jasa yang dapat dijual di seluruh dunia dan mampu bersaing secara global dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan bahwa negara kita berbentuk susunan kesatuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan persatuan Indonesia. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.¹

¹Joeniarto. Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-Luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal. Gajah Mada. Yogyakarta.1975, hal. 7.

Hal ini diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.²

Secara teoritis, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa dan mewujudkan aspirasi masyarakat secara efektif antara lain akan sangat tergantung kepada ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satunya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang paling berpengaruh untuk daerah. Pendapatan Asli Daerah ini dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam memompa dan mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah otonom. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penggalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah.³

²Undang-Undang Dasar 1945.

³ Ayi Karyana. Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005, hal. 12.

Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inovasi sebagai perwujudan pemerintah daerah dalam melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Dengan gerakan “ Bela Beli Kulon Progo” program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat⁴, serta agar dapat menambah Pendapatan Asli Daerah dan sebagai upaya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Strategi Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sangat menarik, masyarakat daerah diajak untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk lokal. “Perangi Teknologi Dengan Ideologi”, itulah prinsip yang di gelorakan bupati Hasto Wardoyo dalam membangun Kulon Progo. Salah satu implementasi dari prinsip yang dipegangnya tersebut yaitu melalui Program Bela Beli Kulon Progo ini.

Program Bela Beli Kulon Progo adalah gerakan membela dan membeli produk-produk lokal, program ini resmi dicanangkan sejak 25 maret 2013 untuk mengajak masyarakat membangun perekonomian Kulon Progo dengan mengutamakan produk sendiri ketimbang produk asing. Dukungan masyarakat terhadap produk lokal diharapkan mampu menghadapi persaingan Asean Free Trade Area (AFTA) di tahun 2015⁵.

Dengan adanya Program bela beli Kulon Progo ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil memberdayakan sejumlah produk unggulan yang dihasilkan dalam beberapa bidang usaha antara lain adalah air minum dalam kemasan, beras hasil produksi gabungan kelompok tani (gapoktan), batik geblek renteng, dalam proyek infrastruktur juga harus menggunakan bahan-bahan dari kulon progo, misalnya andesit, batu, dan pasir serta minimarket-minimarket terkenal berskala nasional yang telah menjalin kemitraan sehingga namanya diganti menjadi Tomira (Toko Milik Rakyat), tomira ini wajib menjual produk-produk asli kulon progo, termasuk AirKU, beras gapoktan, telur asin rasa soto dan sebagainya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo menilai kebijakan Bela Beli Kulon Progo mampu menekan dampak krisis ekonomi tingkat daerah, sehingga tidak berdampak kepada peningkatan angka kemiskinan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kulon Progo Sugeng Utama

⁴<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/ILPPD2012.pdf> diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 15.56 WIB

⁵www.tifafoundation.org diakses pada tanggal 9 september 2015 pukul 22.10 WIB

mengatakan bahwa Kebijakan bela beli kulo Progo mampu menggerakkan perekonomian masyarakat kecil dan mengupayakan produk lokal diterima di pasaran, hal ini mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Melalui program ini juga mampu menekan peningkatan jumlah kemiskinan di Kulon Progo, masyarakat diberdayakan, sehingga mereka bekerja dan penghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan⁶. Bahkan bupati Kulon Progo dr.H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) mengatakan pendapatan asli Daerah (PAD) kabupaten Kulon Progo naik dari sebelumnya PAD kulon progo hanya Rp 98 miliar, sekarang menjadi Rp 158 miliar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bupati Kulon Progo dr.H. Hasto Wardoyo, Sp. OG(K) di Hotel Cavinton, Yogyakarta, Kamis, 21 Mei 2015.⁷

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan program bela beli kulon progo?
2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan program bela beli Kulon Progo?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu⁸. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan program bela beli Kulon Progo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kabupaten Kulon Progo, dan dokumentasi diperoleh melalui laporan tahunan Dinas Koperasi dan UMKM serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

⁶www.antarayogya.com diakses pada tanggal 9 oktober 2015 pukul 14.35 WIB

⁷<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/22> Diakses pada tanggal 9 oktober 2015 pukul 14.02 WIB

⁸ Zuriyah, N, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi – Teori, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, halaman 47.

(LKJIP). Unit analisis yaitu jajaran instansi terkait yaitu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta para staf di dinas ini. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, menganalisis data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari data yang telah diteliti.

PEMBAHASAN

A. PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM BELA BELI KULON PROGO

1. Menyelenggarakan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tujuan yaitu dengan menyelenggarakan pembinaan kelembagaan, menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidangnya. Tujuan tersebut berhubungan dengan target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam merealisasikan program bela beli, tentunya apabila target program bela beli tercapai maka tingkat perekonomian dari masyarakat yang mengikuti program bela beli akan meningkat.

a. Peran bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM

Peran bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu mematenkan produk bela beli yang berada di masyarakat seperti beras, batik, gula yang sudah digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Kulon Progo. Selain itu juga peran bidang koperasi dan UMKM yaitu membuat laporan data dan membuat target tahunan dalam bentuk RPJMD yang tujuannya untuk mendapat modal dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal mematenkan produk bela beli Pemerintah Kulon Progo melakukan pendaftaran produk pada HAKI agar semua produk dapat di lisensi oleh Pemerintah Kulon Progo dan tidak dapat dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Berhubungan dengan HAKI pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan perlindungan pada merek produk UMKM yang sesuai dengan ketentuan Undang –

undang Nomor 15 Tahun 2001, yang tujuannya lebih memotivasi kerja dan berimplikasi positif dalam meningkatkan daya saing sehingga meningkatkan pendapatan. Untuk memberikan perlindungan merek dagang barang-barang hasil produksi UMKM maka diadakan Kerjasama antara Departemen Hukum Dan HAM RI dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor : M-10-UM.06.07.TH 2006 dan 06/NK/M.KUKM/IV/2006 Tentang Peningkatan Pemahaman Dan Pemanfaatan Sistem Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat perlindungan merek dagang bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Pertimbangan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut :

- a. UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki kontribusi yang nyata dalam perekonomian nasional.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan dan pentingnya pemanfaatan sistim Hak Kekayaan Intelektual (khususnya Hak Merek) di kalangan pelaku UMKM sektor industri makanan seperti jenang masih perlu disosialisasikan.
- c. Koordinasi dan kerjasama yang sinergi antara para pihak dan upaya peningkatan penyebaran , pemahaman dan pemanfaatan sistem Hak kekayaan Intelektual belum optimal dalam perlindungan merek dagang.

Tujuan diadakan kerjasama antara Departemen Hukum Dan HAM RI dengan Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pemanfaatan sistim HAKI khususnya merek dagang dikalangan pelaku UMKM.
- b. Mewujudkan UMKM berorientasi HAKI khususnya Hak Merek, memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dalam persaingan global.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan produktif antara para pihak dalam mengembangkan UMKM dan memberdayakan sistim Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) nasional.

b. Hasil yang dicapai oleh bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM

Hasil yang dicapai oleh bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu berupa peningkatan kerjasama di bidang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) seperti membuat semua produk beli menjadi memiliki hak cipta (*copyrights*) dan hak milik perindustrian (*industrial property rights*). Selain itu juga hasil yang dicapai yaitu sudah berhasil mendorong UMKM menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif sehingga meningkatkan pemasukan bagi anggota UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya dan dapat mengembangkan kegiatan usahanya sendiri.

Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah terlaksana dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HaKI diikuti 25 peserta, dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang pentingnya HAKI dan tata cara pengajuan HaKI. Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HAKI ini memiliki manfaat bagi penguatan UMKM yaitu yang pertama mendorong UMKM menghasilkan produk dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif. Kedua, untuk meningkatkan *income generate* UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya. Ketiga, untuk keberlanjutan UMKM sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya.⁹ Adapun daftar UMKM yang memperoleh fasilitasi HAKI Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :¹⁰

⁹ Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 25

¹⁰ LKjIP Dinkop UMKM Kulon Progo. 2014. hal. 35

Tabel 3.1

**Daftar UMKM Memperoleh HAKI Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2014**

No	Nama UMKM	Alamat	Produk
1	" 86"	Depok Rt 45/Rw 28 desa Sukoreno Kec. Sentolo	Bakpia
2	Rahayu	Clumpit Rt 36 Rw 18 Gerbosari Kec. Samigaluh	Kain Batik
3	BA (bayu aji)	Pengasih Rt 02/Rw 01 desa pengasih kec pengasih	Kripik Belut, Kripik lkan
4	Batik "Thok Thil"	Nglatiyan I Rt 01/Rw 01 Desa ngentakrejo Kec. Lendah	Kain Batik
5	Java Menoreh	Semaken Rt 08 Rw 34 Desa Banjararum Kec. Kalibawang	Minuman Instant
6	Alat Pemintal Tali	Tanjunggunung Rt/22 Rw 08 Tanjungharjo Nanggulan	Alat Pemintal Tali

2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Bidang permodalan Dinas Koperasi dan UMKM sudah diatur dalam LAKIP 2014 yang menyatakan bahwa memberikan fasilitasi penguatan modal dengan cara kemitraan dengan Perbankan melalui KUR, kemitraan dengan BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Kebijakan ini harus ada pada program bela beli dikarenakan dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM maka ruang gerak dalam upaya pengembangan program bela beli yang dilakukan oleh anggota UMKM tidak terbentur oleh hukum yang mengatur mengenai jual beli produk lokal. Selain itu juga dengan adanya kebijakan pada program bela beli yang sudah di atur dalam LAKIP 2014 memberikan kesempatan kepada anggota UMKM untuk menjual produk lokalnya ke luar negeri.

Berdasarkan penguatan modal yang dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM pada tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Penguatan Modal dan Bantuan Sarana
Koperasi dan UMKM Tahun 2014**

NO	Nama Program	Penerima	Alamat	Nominal	Sumber dana
1	Revitalisasi Pasar Tradisional	KUD Gangsar	Sentolo, Kulon Progo	900,000,000	APBN Kemenkop UKM
2	Bantuan Peralatan Kakao	KSU Hapsari	Kalibawang, Kulon Progo	300,000,000	APBN Kemenkop UKM
3	Bansos Permodalan	KSU Permata	Temon, Kulon Progo	50,000,000	APBN Kemenkop UKM
		KSU Mekar Jaya	Temon, Kulon Progo	50,000,000	APBN Kemenkop UKM
		KJKS BMT Bangun	Wates, Kulon Progo	50,000,000	APBN Kemenkop UKM
		KSU BMT Giri Makmur	Gendu Jatimulyo Girmulyo	50,000,000	APBN Kemenkop UKM
4	Pendampingan KUR	KSU Hapsari	Kalibawang, Kulon Progo	22,000,000	APBN Kemenkop UKM
		KSU BMT Amanah	Galur Kulon Progo	22,000,000	APBN Kemenkop UKM
				1,444,000,000	
5	Dana Bergulir	30 Koperasi	Wates Kulon Progo	5,000,000,000	LPDB
		100 UKM	Kulon Progo	5,000,000,000	
				10,000,000,000	
6	PKBL	8 UMKM	Kulon Progo	230,000,000	ASEI
		7 UMKM	Kulon Progo	180,000,000	Bank Mandiri
				410,000,000	
7	Bantuan Peralatan	2 KOP	Kulon Progo	132,000,000	APBD KAB
		7 UMKM			
		Jumlah		11,986,000,000	
8	KUR	45 UMKM	Kulon Progo	4.241.000.000	BPD Wates
		10.960 UMKM	Kulon Progo	77.174.225.000	BRI
		Jumlah		81.415.225.000	

Sumber : LAKIP, 2014

Dari tabel diatas didapat penjelasan dari Kepala bidang Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM bahwa penguatan Modal dan Bantuan Sarana dengan Program revitalisasi pasar tradisional, bantuan peralatan kakao, bansos permodalan, pendampingan KUR dan bantuan peralatan didapatkan dengan status bantuan sosial atau hibah,

sedangkan untuk dana bergulir, PKBL, dan KUR adalah pinjaman dengan rincian dana bergulir LPDB yang berjumlah 10.000.000.000 ini diturunkan kepada PD Bank Pasar Wates kemudian dibagi dua, 5.000.000.000 untuk koperasi dan 5.000.000.000 untuk sektor UMKM, untuk pembayaran nantinya koperasi dan UMKM akan mengangsurkan kepada PD Bank Pasar Wates dan kemudian PD Bank Pasar Wates akan membayar ke LPDB. Untuk PKBL ASEI penguatan modal yang diberikan langsung diberikan kepada koperasi maupun UMKM, kemudian koperasi dan UMKM ini nantinya akan langsung membayar ke rekening Bank milik ASEI dan ketentuan ini tertuang dalam perjanjian. Sedangkan penguatan modal dari Bank Mandiri yang notabene adalah yang didalamnya terdapat saham milik Pemerintah, 1 – 3% digunakan untuk penguatan modal Koperasi dan UMKM dengan bunga 6% pertahun atau 0,5% perbulan, pinjaman ini diambil dari keuntungan saham pemerintah. Sama halnya dengan penguatan modal KUR dari BPD Wates dan BRI pembayaran pinjaman langsung dilakukan oleh Koperasi dan UMKM ke Bank tersebut.

Bantuan diatas ada yang berbentuk dana dan ada juga dalam bentuk alat-alat, namun secara keseluruhan bantuan penguatan modal dan sarana diatas pada intinya adalah untuk meningkatkan usaha Koperasi dan UMKM, baik itu memperkuat simpan pinjam, struktur permodalan, dan peningkatan sarana usaha.

a. Peran bidang permodalan Dinas Koperasi dan UMKM

Peran bidang permodalan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu menyusun pedoman dan petunjuk teknis, memberikan pembinaan dan bimbingan permodalan, bimbingan usaha koperasi, dan simpan pinjam koperasi, menyelenggarakan pengembangan permodalan dan menyelenggarakan fasilitas pengembangan simpan pinjam.

Peran yang terlihat yaitu melakukan link pendanaan dari dana kementerian, melakukan pendampingan, membantu membuat proposal, melakukan monitoring dan melakukan evaluasi. Bentuk monitoring yang nyata yaitu adanya pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi UMKM yang berhasil memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar Rp.195.200.000,- dari target sebesar Rp. 195.275.000,- atau 100,03 %. Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dana

perkuatan modal dari berbagai sumber baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain. Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada KUMKM. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan akuntabilitas dana pemerintah.¹¹

b. Hasil bidang permodalan Dinas Koperasi dan UMKM

Pada program bela beli yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM membawa hasil yang positif bagi masyarakat setempat, hasil yang positif tersebut yaitu terlihat dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat yang meningkat dan perekonomian lokal meningkat. Hal ini terjadi karena program bela beli yang dilaksanakan oleh UMKM yaitu selalu mendahulukan menggunakan produk bela beli sesuai dengan informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Hasil yang nyata dari adanya program bela beli ini yaitu adanya kerjasama link antara lembaga BUMN dan Bank dan adanya peningkatan permodalan koperasi.

Hasil kinerja yang sudah dilakukan yaitu memberikan fasilitasi, informasi, sosialisasi di RAT (Rapat Anggota Tahunan) Koperasi, mengurus hak cipta milik PEMDA Kulon Progo dan membuat hubungan kerja dengan BUMN dan BANK. Bentuk informasi yang diberikan yaitu memberikan laporan hasil identifikasi kemajuan serta permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan¹². Bentuk pengurusan hak cipta yang dilakukan oleh PEMDA yaitu dengan memahami materi HAKI dan menerbitkan HAKI serta hak paten¹³. Bentuk kerjasama yang dilakukan berbentuk menjalin kerjasama kemitraan dengan 90 UMKM, BANK dan BUMN¹⁴.

¹¹ Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 26

¹² Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 20

¹³ Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 21

¹⁴ Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 22

Bentuk sosialisasi yang dilakukan berbentuk mempublikasikan tertibnya pengelolaan penggunaan dana pemerintah yang telah diterima KUMKM¹⁵.

3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM berfungsi untuk menyelenggarakan pemberdayaan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pemberdayaan usaha. Dengan adanya pemberdayaan sumber daya manusia maka program bela beli dapat dijalankan dengan baik. Hubungannya sumber daya manusia dengan program bela beli yaitu program bela beli tidak dapat terlaksana dengan baik apabila di dalamnya tidak terdapat sumber daya manusia yang bagus, karena program bela beli banyak terhubung dengan instansi ataupun lembaga yang memiliki birokrasi yang lebih kompleks. Selain itu dengan adanya program bela beli kulon progo dapat menyelenggarakan pemberdayaan usaha, baik itu membuat produk yang nantinya akan di lisensi dengan kemasan produk bela beli. Dengan adanya kebijakan pada program bela beli membuat kualitas produk bela beli menjadi terjamin.

Tujuan dari diklat yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan organisasi Koperasi. Terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali meliputi diklat akuntansi simpan pinjam untuk pengelola KSP/USP sebanyak 2 angkatan dengan peserta 30 orang dan diklat audit bagi pengawas koperasi sebanyak 1 angkatan dengan peserta 30 orang pengawas. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat ini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait administrasi keuangan atau pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang akuntabel.¹⁶

a. Peran bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM

Peran yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu melakukan pemberdayaan SDM, agar program bela beli dapat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada. Untuk itu dalam hal pemberdayaan tersebut perlu

¹⁵ Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 22

¹⁶ Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 34

adanya diklat yang diberikan kepada sumber daya manusia yang mengikuti program bela beli agar dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas koperasi yang terpercaya. Selain itu juga peran bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui langkah-langkah pemeriksaan seperti melakukan analisis, pengecekan, komparasi, konfirmasi, , inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan memeriksa dokumen dasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, dianalisa bahwa peran yang dilakukan yaitu dengan mengadakan diklat. Adapun diklat yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM selama tahun 2014-2015 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Dinas Koperasi dan UMKM 2014-2015

NO	Nama Diklat	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Jumlah Peserta	Tujuan
1	Akuntansi Bagi Pengurus Koperasi	28 April – 4 Mei 2014	RM. Girli Wates	25 orang	Memberikan pemahaman untuk pengelola koperasi agar tertib administrasi keuangan dan dapat menyelenggarakan koperasi dengan baik
2	Audit Bagi Pengawas Koperasi	19 – 23 Mei 2014	RM. Girli Wates	25 orang	Agar pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan bisa mengaudit kinerja pengurus

					sesuai dengan anggaran dasar apakah ada penyimpangan atau tidak.
3	Kewirausahaan	6 – 10 April 2015	RM. Girli Wates	30 orang	Untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada UMKM di Kulon Progo agar masyarakat bisa menjalankan usaha walaupun dalam skala mikro, kecil, ataupun menengah.
4	Akuntansi	18 – 22 Mei 2015	RM. Girli Wates	30 orang	Memberikan pemahaman untuk pengelola koperasi agar tertib administrasi keuangan dan dapat menyelenggarakan koperasi dengan baik
5	Audit Untuk Pengawas Koperasi	25 – 29 Mei 2015	RM. Girli Wates	30 orang	Agar pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan bisa mengaudit kinerja pengurus sesuai dengan

					anggaran dasar apakah ada penyimpangan atau tidak.
6	Diklat Perkoperasian	8 – 13 Juni 2015	RM. Girli Wates	30 orang	Agar pengurus dan pengelola koperasi bisa mengikuti tes sertifikasi sebagai manajer ataupun bagian pembukuan agar bisa lulus.
7	Bisnis Plan Bagi UMKM	24 – 28 Agustus 2015	Restoran Saiyo Sapta Pesona Wates	30 orang	Memberikan bimbingan perencanaan bisnis bagi UMKM, harapannya agar rencana kerja UMKM bisa terus jalan dan perputaran uang selalu lancar.
8	Kewirausahaan	7 – 11 September 2015	Restoran Saiyo Sapta Pesona Wates	30 orang	Untuk memberikan motivasi dan bimbingan kepada UMKM di Kulon Progo agar masyarakat bisa menjalankan usaha walaupun dalam skala mikro, kecil,

					ataupun menengah.
9	Pengelolaan Koperasi Syari'ah	14 – 18 September 2015	Restoran Saiyo Sapta Pesona Wates	30 orang	Bimbingan agar pengurus ataupun pengelola koperasi yang berbasis syari'ah agar bisa lebih maju dan pengelolaanya benar sesuai dengan syari'ah.
10	Analisis Laporan Keuangan Koperasi	5 – 9 oktober 2015	Restoran Saiyo Sapta Pesona Wates	30 orang	Agar penyusunan laporan maupun laporan akhir tahun koperasi yang dilakukan oleh bendahara, juru buku, dan pengelola Koperasi dapat sesuai dengan yang diatur oleh Kementerian Koperasi.
11	Pengawasan bagi pengawas Koperasi	19 – 23 Oktober 2015	Restoran Saiyo Sapta Pesona Wates	30 orang	Memberikan bekal bagi pengawas Koperasi agar bisa menjalankan tugasnya sebagai pengawas dengan baik dan sesuai

					aturan yang berlaku.
12	Manajemen Usaha Kecil untuk pengurus Koperasi dan Pengelola sektor riil UMKM	26 – 30 Oktober 2015	Restoran Saiyo Sapta Pesona Wates	30 orang	Memberikan motivasi dan bimbingan kepada pengurus Koperasi dan UMKM di Kulon Progo agar bisa menjalankan usaha walaupun dalam skala mikro, kecil, ataupun menengah.
13	Kompetensi SDM Pengelola Koperasi	2 – 6 November 2015	Restoran Saiyo Sapta Pesona Wates	30 orang	Memberikan bekal dan pengetahuan bagi pengurus dan pengelola koperasi untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.

Sumber : Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM

Dengan ikut sertanya pengurus ataupun pengelola Koperasi dan UMKM mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

Selain itu juga bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui langkah-langkah pemeriksaan seperti melakukan analisis, pengecekan, komparasi,

konfirmasi, *footing*, inspeksi, verifikasi, rekonsiliasi, testing, penelusuran dan *vouching* (memeriksa dokumen dasar). Implementasi program tersebut dapat mewujudkan beberapa capaian kinerja di RPJMD yaitu jumlah Koperasi target sebesar 365 unit, realisasi capaian sebesar 363 unit, ini menunjukkan pengembangan dan pembinaan kelembagaan serta organisasi Koperasi tahun 2014 berjalan baik dengan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah pusat, Perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda), Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia (Hipmikindo) dan lembaga lainnya. Selain itu implementasi program peningkatan kelembagaan Koperasi dapat mewujudkan capaian kinerja di RPJMD Koperasi aktif mendapatkan target 92,56% dengan realisasi capaian sebesar 93,15% atau sebesar 340 Unit.¹⁷

b. Hasil bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM

Hasil bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dapat dibuktikan dari pencapaian kinerja yang telah dibuat sesuai dengan target yang terukur dengan memperhatikan masalah, peluang maupun isu strategis yang ada dengan cara memperluas kesempatan berusaha, dan jangkauan pasar lokal, regional dan ekspor. Hal ini terbukti dari hasil program bela beli seperti produk gula semut ini di produksi oleh KSU Jatirogo dan koperasi ini menjadi besar yang sudah mampu memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, selain itu juga bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM sudah berhasil memfasilitasi para anggota Koperasi Tenun Mumbul, Kalibawang untuk magang ke Jepara dengan maksud agar sepulangnya dari magang tersebut mendapat ide baru dalam upaya mengembangkan produk-produk tenun pada program bela beli.

¹⁷ Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2014. hal. 34

B. KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM BELA BELI KULON PROGO

1. Kegiatan bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM

Program bela beli yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM perlu adanya kegiatan bidang kelembagaan, maksudnya yaitu Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerjasama dengan lembaga lain agar program bela beli dapat dilaksanakan dengan baik, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga BUMN dan Bank hal ini dilakukan agar Dinas Koperasi dan UMKM nantinya mendapat bantuan materil dari lembaga-lembaga tersebut. Agar kegiatan kelembagaan ini menjadi menyuluruh informasinya maka perlu adanya sosialisasi, pendataan, penyuluhan mengenai program bela beli kepada

2. Kegiatan bidang permodalan Dinas Koperasi dan UMKM

Kegiatan yang dilakukan pada bidang permodalan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu mengadakan rapat tahunan yang tujuannya untuk memberikan pertanggungjawaban pengurus, pengawas selama kegiatan selama satu tahun untuk menyampaikan program-programnya. Bidang permodalan melakukan kerjasama dengan menggandeng BUMN dan BANK. BUMN meliputi PT. Pos Giro, PT Askes, PT. Telkom, PT. Perum Peruri, PT ASEI (asuransi) dan PT.Bank Mandiri, sedangkan untuk BANK meliputi Bank BRI, BNI, dan BPD DIY.

3. Kegiatan bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang bela beli oleh bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu dalam bentuk diklat, pelatihan, pameran dan memfasilitasi terbitnya sertifikasi HAKI.

C. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan Program Bela Beli Kulon Progo

Hambatan yang dijumpai oleh Dinas Koperasi dan UMKM selama berjalannya program bela beli kulon progo yaitu adanya hambatan pada masalah peminjaman modal kepada Bank dan adanya keterlambatan anggota Koperasi UMKM dalam membayar pinjamannya, hal ini terjadi dikarenakan belum adanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

Kemudian selanjutnya yaitu pada masalah pendanaan untuk meneruskan ataupun melanjutkan program bela beli agar program bela beli ini dapat terlaksana sampai seterusnya dan bukan hanya sebagai program jangka pendek tetapi menjadi program yang berangka panjang. Dengan adanya program bela beli kehidupan anggota UMKM menjadi meningkat taraf hidupnya, artinya disini program bela beli berdampak positif. Untuk itu perlu adanya pendanaan yang berkesinambungan dalam upaya pengembangan program bela beli.

D. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menghadapi hambatan

Upaya yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam menghadapi hambatan yaitu dengan cara menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga BUMN ataupun dengan mengupayakan dana dari APBD

Kemitraan dan penguatan modal yang dilakukan UMKM dengan BUMN melalui Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, penguatan modal dari Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (BLU-LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI.

KESIMPULAN

Peran dari Dinas Koperasi dan UMKM ini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dapat memberikan peningkatan serta kemajuan dalam berjalannya program bela beli kulon progo, dan dalam rangka mewujudkan Bela Beli Kulon Progo Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Kulon Progo No.3 tahun 2008 yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi usaha mikro kecil menengah.

Bidang kelembagaan memiliki target untuk mendirikan koperasi dan UMKM, namun bagian kelembagaan tidak hanya fokus kepada kuantitas pendirian koperasi dan UMKM tetapi lebih memfokuskan kepada kualitas. Hal ini dilakukan karena kegiatan koperasi dan UMKM tidak terlepas dari visi dan misi yang sudah diatur dalam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Peran bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pengurusan HAKI terhadap produk-produk yang dibuat oleh masyarakat ataupun yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selain itu bidang kelembagaan koperasi dan UMKM membuat laporan data dan membuat target tahunan dalam bentuk RPJMD yang tujuannya untuk mendapat modal dari pemerintah kabupaten Kulon Progo. Dan untuk hasil yang dicapai oleh bidang kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM yaitu mengurus HAKI produk hasil UMKM Kulon Progo yaitu dengan cara peningkatan kerjasama di bidang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Pengembangan Usaha KUMKM.

2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kebijakan yang dibuat yaitu semua produk yang berasal dari koperasi dan UMKM dijual kepada masyarakat dan digunakan oleh masyarakat sendiri, kebijakan yang lainnya yaitu produk lokal di jual keluar negeri (ekspor), dan kebijakan lainnya yaitu koperasi dan UMKM yaitu melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia. Untuk kegiatan yang dilakukan dalam bidang permodalan yaitu mengadakan rapat tahunan yang tujuannya untuk memberikan pertanggung jawaban pengurus, pengawas selama kegiatan selama satu tahun untuk menyampaikan program-programnya. Bidang permodalan juga melakukan kerjasama dengan BUMN dan BANK.

Peran yang sudah dilakukan yaitu melakukan link pendanaan dari dana kementerian, melakukan pendampingan, membantu membuat proposal, melakukan monitoring dan melakukan evaluasi. Kemitraan dan penguatan modal juga dilakukan bidang ini dengan BUMN melalui Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, penguatan modal dari Badan Layanan Umum-Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (BLU-LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI.

3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kebijakan yang dilakukan disesuaikan dengan tupoksi yaitu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan dari diklat yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dan organisasi Koperasi. Kegiatan bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM selain dalam bentuk diklat juga ada pendampingan pameran serta memfasilitasi terbitnya sertifikasi HAKI.

Peran bidang pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM ini khususnya lebih banyak dalam mengadakan diklat, dengan ikut sertanya Koperasi dan UMKM mengikuti diklat dengan diklat ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

B. Saran

Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan program bela beli Kulon Progo hendaknya menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan program tersebut pada masa yang akan datang. Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa yang akan datang, perlu ditingkatkan koordinasi dengan *stakeholder* maupun instansi yang lain, khususnya dalam hal :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil (SDM), baik melalui diklat formal/non formal maupun diklat teknis yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan secara optimal dalam menjalankan tugas sebagai pembina sektor Kelembagaan, Pemberdayaan, dan Permodalan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
3. Perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap usaha kecil menengah perlu ditingkatkan terutama dalam hal realisasi anggaran karena sektor tersebut merupakan penggerak perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan terbukti memberikan sumbangan pendapatan daerah dan PDRB yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Zarkasi Efendi dkk, *Demokrasi Ekonomi: Koperasi dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, Averroes Press, Malang, 2012.

Bratakusumah Deddy Supriady, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia, Jakarta, 2003.

Dunn N. William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, UGM, Yogyakarta, 2003.

Nurcholis Hanif, *Teori dan Politik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.

Saebani, B.A, *Metode Penelitian*, CV . Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Salossa S. Daniel , *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.

Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Yogyakarta, 1987.

Suhardono Edy, *Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Suharto Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Susanto S. Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta. 1983.

Suyanto, Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, Jakarta, 2006.

Utama I Made Arya, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007.

Winarno Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2005.

Zuriah, N, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Aplikasi – Teori*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014

Statistik Daerah Kabupaten Kulon Progo 2014

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

JURNAL DAN DIKTAT

Ayi Karyana. Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1, Nomor 1, September 2005.

Robiyati Podungge , Jurnal: Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan, Volume 7, Nomor 1, Maret 2010.

Titin Purwaningsih, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan, Peran-Peran Pokok Pemerintahan.

INTERNET

www.tifafoundation.org diakses pd tgl 9 september 2015 pukul 22.10

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/22/058668430/terapkan-kawasan-tanpa-rokok-pendapatan-kulon-progo-naik> diakses pada tanggal 9 oktober 2015 pukul 14.02 WIB

<http://www.antarayogya.com/berita/335010/bps-bela-beli-kulon-progo-tekan-krisis-ekonomi> diakses pada tanggal 9 oktober 2015 pukul 14.35 WIB

<http://www.jpip.or.id/artikelview-430.html> diakses pada tanggal 15 oktober 2015 pukul 13.00

<http://beliindonesia.com/?p=1422> diakses pada tanggal 15 oktober 2015 pukul 14.14 WIB

<http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/3237-perangi-kemiskinan-pns-kulon-progo-dampingi-kk-miskin> diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 14.50 WIB

<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/ILPPD2012.pdf> diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 15.56 WIB

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Dinas-Koperasi-Usaha-Mikro-Kecil-Menengah_175_hal diakses pada tanggal 16 oktober 2015 pukul 21.45 WIB

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal diakses pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 15.32

